

Pemkab Magelang Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

MAGELANG (KR) - Pemerintah Kabupaten Magelang kembali meraih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) yang ke tujuh kalinya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghargaan diserahkan langsung oleh Plt Direktur Jenderal HAM, Dr. Muallimin Abdi kepada Bupati Magelang Zaenal Arifin pada saat acara Peringatan Hari HAM se-Dunia Ke-74 Tahun 2022 di Golden Ballroom Hotel Sultan dan Residence, Tanah Abang, Jakarta, Senin (12/12).

Bupati Magelang Zaenal Arifin mengaku bangga atas diraihnya penghargaan Kriteria Peduli HAM untuk ke tujuh kalinya ini. Menurutnya ini merupakan bukti kerja keras bersama dari seluruh tim Pemerintah Daerah, seluruh jajaran birokrasi melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang. "Ini hasil dari kerja bersama, kerja gotong-royong dan kembali kita mendapatkan penghargaan yang ke tujuh hari ini," ungkap Zaenal. Zaenal berharap agar prestasi ini dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan kembali di masa-masa yang akan datang.

"Harapannya, melalui penghargaan ini nantinya dapat terus memotivasi kita semua untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga penghargaan ini dapat terus kita raih tiap tahunnya," katanya. Untuk diketahui, Penghargaan Peduli HAM ini diraih pertama kali oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2013 kemudian tahun 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang Ratna Yulianty menjelaskan ada beberapa indikator yang menjadi penilaian dalam penghargaan tersebut sesuai PermenKumHam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM. (Bag)-f



KR-Istimewa

Bupati Magelang Zaenal Arifin menerima penghargaan Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM yang diserahkan oleh Plt Direktur Jenderal HAM, Dr Muallimin Abdi.

Boyolali Miliki Wisata Edukasi Baru

BOYOLALI (KR) - Kota Susu Boyolali tak henti-hentinya menyuguhkan beragam destinasi wisata yang selalu membuat setiap orang terkesima. Berbagai tempat wisata terus bermunculan, salah satunya adalah Cepogo Cheese Park yang terletak di Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali menyuguhkan wisata edukasi. Selain itu, obyek wisata ini juga menjadi tempat yang nyaman untuk bersantai bersama keluarga.

Pengunjung disuguhkan disebelah barat pemandangan Gunung Merapi dan Merbabu, Tak ketinggalan pula, ada berbagai macam-macam binatang yang bisa dikenalkan ke anak-anak. Sehingga, obyek wisata Cepogo Cheese Park ini cocok dikunjungi oleh semua usia. Harga tiket destinasi wisata baru Cepogo Cheese Park cukup terjangkau. Tiket masuk Rp20.000 per orang. Sebagai promosi awal, pengelola juga akan memberikan diskon kepada pengunjung sebesar 25%.

Cepogo Cheese Park diresmikan oleh Bupati Boyolali M Said Hidayat. Dalam sambutannya, Bupati mengungkapkan pada tahun 2019 disaat Bupati pendahulu Seno Samodro sebagai inisiator Cepogo Cheese Park. "Mengucapkan rasa syukur atas soft opening Cepogo Cheese Park, ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bambang Sutantio selaku investor yang menanamkan modal di Kabupaten Boyolali. Bukan hanya sekedar usaha bisnis oriented, tetapi termasuk berkaitan dengan edukasi. Nah, inilah yang membahagiakan kita semua. Semoga dengan dibukanya Cepogo Cheese Park dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat," Kata Said Hidayat, Senin (12/12). (R-3)-f

Polines Terima Bantuan Kendaraan Operasional BNI

SEMARANG (KR) - Politeknik Negeri Semarang (Polines) menerima bantuan kendaraan operasional dari BNI Kantor Wilayah 05 Semarang. Penyerahan dilakukan Wakil Pemimpin Operasional BNI Kantor Wilayah 05 Sakariza Q Hemawan kepada Direktur Polines Prof Dr Totok Prasetyo ASEAN Eng di kampus Tembalang, Senin (12/12). Menurut Sakariza Q Hemawan, bantuan kendaraan operasional kepada Polines sebagaimana momentum dukungan BNI dalam ekosistem pendidikan perguruan tinggi. Juga sebagai bentuk simbol kedekatan dan kolaborasi antara BNI dengan Polines dalam mendukung kemajuan pendidikan.

"Terpenting adalah filosofinya. Polines menyerahkan kepercayaan atau trust kepada kami, dan kami menerima kepercayaan dari Polines. Juga bantuan ini bisa digunakan atau bermanfaat serta berkah," ungkap Sakariza Q Hemawan. Sedangkan Direktur Polines Prof Dr Totok Prasetyo ASEAN Eng menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan kendaraan operasional dari BNI. Bantuan yang diberikan sangat berguna bagi civitas akademika Polines baik dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidikan terkait dengan pelaksanaan tri Dharma Perguruan Tinggi (penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat). (Sgi)-f



KR-Sugeng Irianto

Prof Totok Prasetyo (kiri) dan Sakariza Q Hemawan menyiram kendaraan bantuan.

KETUA DPRD PURWOREJO MENGAJAR DI SMK YPT

Ajak Siswa Beradaptasi Hadapi Revolusi Industri 4.0



PURWOREJO (KR) Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi SIKOM MSI mengajak siswa di SMK YPT Purworejo untuk secepatnya beradaptasi dengan perkembangan zaman. Adaptasi harus dilakukan karena generasi muda Indonesia saat ini sedang menghadapi Revolusi Industri 4.0. Menurutnya, Revolusi Industri 4.0 berdampak besar pada berbagai sendi kehidupan masyarakat di dunia. Para ahli dari berbagai negara

telah menemukan berbagai terobosan teknologi berbasis kecerdasan artifisial yang mampu mengubah kehidupan manusia. "Saat ini sudah terjadi kolaborasi antara teknologi siber dengan teknik, sehingga otomatisasi pekerjaan menjadi suatu keniscayaan," kata Dion, di hadapan puluhan siswa SMK itu, Kamis (8/12). Dikatakan, otomatisasi itu berpengaruh besar pada dunia kerja dan dunia industri. Ada banyak jenis aktivitas yang sebelumnya dikerjakan manusia, kini digantikan robot dan kecerdasan buatan.

Maka apabila tidak mampu beradaptasi, lanjut Dion, generasi milenial atau generasi Z yang berumur lebih muda lagi, akan semakin tertinggal. "Bisa jadi mereka kelak tidak mendapat kesempatan di dunia kerja dan industri," tuturnya. Dikatakan, cara adaptasi yang dapat dilakukan lem-

baga pendidikan antara lain dengan menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman. Selain itu, siswa dituntut untuk lebih melek teknologi informasi dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas diri.

Kemajuan teknologi informasi, kata Dion, seperti dua sisi mata uang. "Tinggal pilih mana, memanfaatkan teknologi informasi untuk hal positif atau negatif. Saat ini, kedua pilihan itu amat sangat mudah untuk dilakukan," tegasnya. Adapun terkait dengan kurikulum pembelajaran, Dion mengapresiasi langkah SMK YPT yang sudah mengajarkan materi tentang mobil listrik kepada siswa.

"Ini adalah satu contoh adaptasi, jika kita tidak mengikuti tuntutan zaman, nanti adik-adik bisa ketinggalan, kita tidak boleh menjadi orang yang bebal, orang yang terlalu kaku dalam

mempelajari ilmu baru. Maka teman-teman harus mampu beradaptasi," paparnya.

Sementara itu, Kepala SMK YPT Purworejo Tri-gonggo mengatakan, kegiatan DPRD Mengajar diikuti puluhan siswa kelas X dari berbagai jurusan. "Kami menyambut baik karena kehadiran Ketua DPRD Purwore-

jo memotivasi anak didik SMK YPT untuk giat belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman," ucapnya. Ditambahkan, SMK YPT Purworejo merupakan Sekolah Pusat Keunggulan atau *Centre of Excellence* (COE). Kemendikbud memberikan predikat COE kepada SMK YPT pada tahun 2020. (Jas)-f



KR-Dokumen

Ketua DPRD Purworejo mengajar di SMK YPT.

Pemerintah Pusat Diharap Kaji Ulang Impor Beras

SEMARANG (KR) - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berharap minta kepada pemerintah pusat untuk mengkaji ulang rencana melakukan impor beras. Wacana impor beras harus ditunda, karena dikhawatirkan bisa membuat harga gabah atau beras hasil panen di tingkat petani jatuh.

Hal itu ditegaskan Ganjar Pranowo kepada wartawan di ruang kerjanya Selasa (13/12), menanggapi kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah pusat. Ganjar meminta agar kebijakan tersebut dipertimbangkan ulang mengingat jerih payah para petani. Ganjar minta kepada pemerintah pusat memperhatikan jerih payah para petani yang saat ini sudah mulai tanam padi. Bahkan ada daerah yang sudah

akan memasuki masa panen. Jangan sampai nanti beras impor masuk, petani pas panen harganya jatuh lagi. Saat ini pupuk sedang sulit, karena subsidi tidak bisa seratus persen. Termasuk obat-obatan yang juga naik harganya.

"Kalau kemudian hasil panennya tidak terbeli dengan harga yang wajar, dikhawatirkan petani akan mengalami kerugian, mengingat biaya tanam yang cukup tinggi. Untuk itu

kami minta agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan impor beras. Lebih baik pemerintah menghitung ulang ketersediaan atau stok beras yang ada," tutur Ganjar.

Pemerintah diminta hati-hati betul dengan data pangan yang ada. Pihak Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, termasuk Badan Pangan Nasional, mereka harus menghitung dan memberikan informasi itu kepa-



KR-Budiono

Ganjar Pranowo

da masyarakat. "Kalkulasi harus dilakukan dengan baik. Jika kebijakan impor terlaksana, besarnya kapan tiba di Indonesia. Kemudian pemerintah juga mesti menghitung masa panen dari padi yang ditanam para petani. Saya lebih setuju untuk menjamin hasil panen petani bisa terserap secara maksimal. (Bdi)-f

PP MAJT Segera Berangkatkan 2 Imam Salat ke Amsterdam

SEMARANG (KR) - Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah (PP MAJT) segera berangkatkan dua delegasinya untuk menjadi imam salat selama Ramadan 1444 Hijriyah, salat rawatib serta mengisi berbagai pengajian di Masjid Al-Ikhlash, Amsterdam, Belanda. Sebelum berangkatkan, MAJT terlebih dulu menyeleksi calon dan memberikan pendidikan dan pelatihan terkait tugas yang bakal diemban.

Pemberangkatan delegasi ini, sebagai bagian dari kerja sama antara PP MAJT dengan Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa (PPME) yang sudah berjalan 10 tahun. PPME memberi kepercayaan hanya kepada PP MAJT sebagai bagian kerja sama internasional, mengingat reputasi MAJT yang menjadi pusat rujukan dan pengembangan Islam moderat dunia, tidak diragukan.

"Hari ini, kami menerima kedatangan tokoh PPME, Budi Santoso, membahas misi pemberangkatan delegasi MAJT yang akan menjadi imam salat selama Ramadan 1444 Hijriyah," kata Ketua PP MAJT Prof Dr KH Noor

Achmad MA, didampingi Budi Santoso, di MAJT, Senin (12/12). Prof Noor Achmad yang juga Ketua Baznas RI memandang penting kerja sama diperluas dengan Baznas RI, misalnya dengan membentuk Baznas di Kota Amsterdam atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid Al-Ikhlash, Amsterdam. Bila, sekedar UPZ, persyaratan tidak berat, sehingga bisa langsung diterapkan.

Misi penting berikutnya dari kerja sama, MAJT menjadikan kerja sama tersebut sebagai momentum strategis untuk mengembangkan nilai-nilai Islam Wasathiyah atau Islam moderat sebagai penjabaran dari Islam Rahmatan Lil Alamin. Para delegasi dibebani tugas MAJT untuk memperkenalkan berbagai kitab karya para ulama nusantara kepada masyarakat Eropa dalam forum pengajian, terutama kepada jemaah Masjid Al-Ikhlash, Amsterdam yang sebagian besar merupakan umat muslim Indonesia. Selama satu bulan penuh diharapkan bisa menyosialisasikan kitab-kitab tersebut untuk membuka khazanah tentang peran ulama nusantara

dalam pengembangan keilmuan Islam yang moderat.

Budi Santoso sebagai senior PPME sekaligus Takmir Masjid Al-Ikhlash, di Amsterdam menegaskan, perspektif yang disampaikan Prof Noor Achmad itu selaras dengan kebutuhan jemaah Masjid Al-Ikhlash, di Amsterdam. Mereka menginginkan tampilan Islam yang moderat, bukan radikal. "Sentuhan Islam wasathiyah sangat dinanti di Amsterdam, yang jemaahnya bedrjumlah ribuan, termasuk dari Suriname, Asia Tenggara, Maroko, dan lainnya. Maka dalam hal ini PPME hanya

mempercayai PP MAJT untuk mengirim delegasi imam shalat dan pengajian-pengajian. Penguasaan jemaah terhadap Alquran biasa saja, tetapi mereka punya pemikiran kritis," kata Budi Santoso.

Menurut Budi Santoso, kriteria delegasi yang akan diberangkatkan, mempunyai akhlak yang baik, hafal Alquran minimal 7 Juz, sehat jasmani dan rohani, menguasai ilmu Tajwid (teori dan praktek), memiliki kemampuan bacaan Alquran yang fasih dan merdu, memahami hukum fikih minoritas (fiqh aqliyyat). (Isi)-f



KR-Isdiyanto

Tokoh PPME Budi Santoso saat rapat dengan pengurus PP MAJT dipimpin Prof Dr KH Noor Achmad MA.

Mencermati Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah

TEKOLOGI saat ini semakin hari semakin berkembang. Perkembangan teknologi berdampak pula pada perkembangan perekonomian termasuk pada sistem perdagangan. Salah satu dampak teknologi terhadap perdagangan adalah pemanfaatan sistem elektronik dalam penawaran/penjualan barang/jasa dan pembayaran. Perdagangan dengan sistem elektronik atau yang biasanya disebut sebagai perdagangan online mempermudah masyarakat untuk mengakses atau melakukan jual/beli dari tempat yang tidak terbatas.

Untuk menunjang dampak dari perkembangan perdagangan secara elektronik, Pemerintah mengeluarkan peraturan yang salah satunya mengatur tentang perdagangan barang/jasa melalui online yaitu PMK Nomor 58/PMK.03/2022 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyerahan, dan/atau Jasa melalui

sistem informasi pengadaan pemerintah. Peraturan ini disahkan bertujuan untuk mendukung pengembangan produk dalam negeri dan meningkatkan transparansi serta efisiensi belanja, untuk mengamankan penerimaan pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah.

Untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak sebagai penyedia barang dan/atau jasa pemerintah serta pihak lain sebagai penyelenggara sistem informasi pengadaan pemerintah. Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau yang disebut SIPP adalah sistem informasi yang digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pengadaan barang dan/atau jasa instansi pemerintah melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik.

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem ini adalah instansi Pemerintah sebagai user sistem pengadaan, terdiri atas instansi pemerintah Pusat, Daerah, dan Desa. Instansi Pemerintah dalam mekanisme pengadaan melalui SIPP bertindak sebagai pembeli dan bukan sebagai pemungut pajak. Rekanan sebagai pengusaha yang menyediakan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan. Rekanan wajib mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pihak Lain yaitu marketplace pengadaan atau ritel daring pengadaan yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi melalui Sistem Informasi Pengadaan. Pihak Lain yang dimaksud dalam peraturan ini ditunjuk sebagai pemungut pajak PPH dan PPN atas pengadaan

barang/jasa pemerintah yang dilakukan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah (SIPP). Pajak yang dimaksud adalah PPN sebesar 11% dari seluruh nilai pembayaran dalam invoice dan PPh Pasal 22 sebesar 0,5%.

Dengan diberlakukannya PMK Nomor 58/PMK.03/2022 ini, diharapkan dapat mendorong perekonomian Indonesia menjadi semakin berkembang. Peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha melalui marketplace dan ritel daring dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Harapannya adalah semakin banyak wajib pajak yang melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya semakin banyak pula penerimaan pajak terhimpun demi mewujudkan Pajak Kuat Indonesia Maju. (*)-f

***) Dian Aprilianti, Fungsional Penyuluh Ahli Madya.**